

PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI

D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006 – 2015

JURNAL



Oleh

Nama : Ryan Setya Budi

NomorMahasiswa : 14313032

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006 – 2015

Ryan Setya Budi

Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email : ryansetya014@gmail.com

Abstrak: Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006 – 2015. Provinsi Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki hak otonomi khusus. Hal itu merupakan dampak dari otonomi dan desentralisasi. Keuangan pun juga ikut terkena dampaknya yang biasanya disebut fiskal daerah. Namun provinsi Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di antara daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengaturan fiskal untuk mempengaruhi kondisi masyarakat demikian maka perlu di kaji. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh variabel kinerja fiskal seperti dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan produk domestik regional bruto tidak mempengaruhi kemiskinan. Hal ini tentu saja akan bisa bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam mengelola fiskal.

Kata kunci: Kemiskinan, DAU, PAD, PDRB , dan Jumlah Penduduk.

Abstract: the effect of fiscal performance on poverty in province d.i. Yogyakarta year 2006 - 2015. Yogyakarta province has a fairly high number of poor people among the remote areas in Indonesia. The government has the authority in fiscal regulation to influence the condition of the community so it is necessary to be reviewed. The objectives of this study are to analyze the effect of fiscal performance variables such as general allocation fund, local revenue, gross regional domestic product and population to poverty in D.I Yogyakarta. The results show that the general allocation funds, local income, and the number of residents have a significant effect on poverty while the gross regional domestic product does not affect poverty. This certainly will be useful for decision makers in managing fiscal.

Keywords: Poverty, DAU, PAD, GRDP, and Population.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari empat daerah yang dikaruniai status keistimewaan oleh negara. Dapat kita kaitkan dengan adanya konsep otonomi daerah dan desentralisasi yang mulai banyak diterapkan di era reformasi. Tidak ada yang menafikkan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang penting. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Otonomi daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususanserta potensi dan keanekaragaman dalam sistem. Namun seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, muncul beberapa kontroversi dalam masyarakat.

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pada pelimpahan wewenang ini juga setelah lama diberlakukan nya otonomi masih butuh penyesuaian. Salah satu pelimpahan yang wewenang yang juga masih banyak terjadi penyesuaian adalah di bidang keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyak nya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Ini yang disebut dengan pelimpahan wewenang di bidang keuangan oleh pusat ke

daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Dana alokasi umum yang biasa di singkat DAU adalah porsi terbesar transfer dari pusat ke daerah. Dana alokasi umum ini dalam APBD masuk dalam kategori pos dana perimbangan. Dana ini sendiri setiap periode mengalami perubahan formula untuk menentukan besaran nya. Dengan kata lain pada dana alokasi umum setiap periode besaran yang di terima tidak sama proporsi yang dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena formula penentu dana alokasi juga di kaji untuk mendapat kan formula yang pas agar tidak terjadi kesenjangan. Hal ini disebabkan karena pada waktu era sentralistik daerah yang mendapat anggaran tidak sesuai dengan kemampuan nya maka terjadi ketergantungan.

Dampak dari perubahan dana alokasi umum setiap tahun nya adalah tentu pada pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri terbagi menjadi 3 sub bagian, yang pertama adalah pendapatan asli daerah biasa disingkat PAD , dana perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah. Karena dana alokasi umum masuk pada dana perimbangan maka itu situlah porsi akan berkurang nya penerimaan daerah. Untuk mengukur ketergantungan fiskal maka di gunakan metode derajat otonomi fiskal/ derajat kemandirian fiskal. Metode ini berguna untuk seberapa besar besar tingkat ketergantungan daerah. Dengan ini masalah yang akan muncul berikut nya adalah

pemerintah daerah akan semakin berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kondisi perekonomian dilihat dengan menggunakan indikator pdrb yang masih banyak digunakan saat ini. Karena dengan melihat pdrb kita dapat mengetahui seberapa nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan. Banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan juga dapat kita lihat bagaimana ekonomi suatu daerah tumbuh pada sektor mana. Jumlah barang dan jasa jika itu meningkat maka pendapatan daerah itu juga meningkat karena terdapat pajak di dalamnya.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi D.I.Yogyakarta (000 Jiwa) Tahun 2011 – 2015

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	92.76	93.21	86.5	84.67	88.1
Bantul	159.4	158.8	159.2	153.5	160.2
Gunung Kidul	157.1	156.5	157.8	148.4	155
Sleman	117.3	116.8	118.2	110.4	111
Yogyakarta	27.7	37.6	37.4	35.6	36
D.I.Yogyakarta	564.3	562.1	565.7	532.6	550.2

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY (2011-2015)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas di Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2011 – 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sampai pada 2013 dan kembali menurun sampe 2015. Belum berhasil nya pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan ini bisa di teliti dengan kinerja fiskal daerah. Variabel-variabel penentu kinerja fiskal akan di cari hubungan nya dengan kemiskinan. Sehingga dengan melakukan penelitian ini akan di ketahui upaya pemerintah daerah dalam upaya mensejah terakan daerah nya lewat kinerja fiskal nya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015 ?
2. Bagaimana keterkaitan variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015 ?

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumberkan pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS DIY) khususnya pada tahun 2006-2015. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data *time series* yaitu periode tahun 2006-2015 sedangkan data *cross section* adalah 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. Data yang diteliti meliputi : (1) Data kemiskinan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin (2) data dana alokasi umum (3) data pendapatan asli daerah D.I.Yogyakarta (4) data PDRB dapat dilihat

dari atas harga berlaku (5) data Jumlah Penduduk dapat dilihat dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I.Yogyakarta dalam berbagai tahun publikasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model *Fixed Effect Model (FEM)*. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$MSKN_{it} = \beta_0 + DAU_{1it} + PAD_{it} + PDRB_{it} + JP_{it} + e_{it}$$

$$MSKN = 83.24569 + 2.25E-07DAU - 1.32E-07PAD + 1.72E-06 PDRB - 0.000150JP + e_{it}$$

Keterangan :

MSKN = Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)

DAU = Dana Alokasi Umum (ribu rupiah).

PAD = Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah).

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah).

JP = Jumlah Penduduk (ribu orang).

β_0 = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien

i = Banyaknya Individu (5 kabupaten/kota DIY)

t = Rentang Waktu (periode 2006-2015)

Data panel akan dianalisis menggunakan tiga model data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Dari ketiga model tersebut, akan dilakukan uji agar mendapat model yang sesuai. Pertama adalah uji Chow dan yang

kedua adalah uji Hausman. Setelah melakukan kedua uji tersebut maka akan di dapat model yang terbaik yang dapat menjelaskan pengaruh variabel-variabel tersebut.

Pengujian yang pertama memilih model antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dengan menggunakan uji Chow. Jika hasil uji chow ini signifikan ($\text{Prob} < \alpha 0.05$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, dan jika hasil uji hausman tidak signifikan ($\text{Prob} < \alpha 0.05$) maka model yang digunakan adalah *Common Effect*. Pengujian selanjutnya memilih model antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* dengan menggunakan uji Hausman. Jika hasil uji Hausman signifikan ($\text{Prob} < \alpha 0.05$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, dan jika hasil Hausman tidak signifikan ($\text{Prob} < \alpha 0.05$) maka model yang layak digunakan yaitu *Random Effect*.

Selain menggunakan tiga model tersebut, penelitian ini juga melakukan uji statistik yaitu Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas, pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F-statistik) dapat melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu tingkat pendidikan, pengangguran dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan, dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t-statistik) untuk melihat apakah nilai tengah (nilai rata-rata) suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara nyata (*significant*) dari nilai tengah dari distribusi nilai (kelompok) lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini akan di ketahui pengaruh variabel kinerja fiskal yaitu DAU, PAD, PDRB dan jumlah penduduk mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta pada tahun 2006-2015.

Tabel 2 Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests Pool: FEM Test cross-section and period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.257856	(4,32)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.456736	4	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eview9 .

Hasil pengujian *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dengan menggunakan uji Chow, didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.001 < \alpha$ yaitu pada tingkatan 5% maka Signifikan, sehingga model yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model* dan kemudian melakukan uji Hausman .

Tabel 3 Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: REM Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.674468	4	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eview9.

Hasil pengujian *Fixed Effect* dan *Random Effect* menggunakan uji Hausman, didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha$ yaitu pada tingkat 5% maka Signifikan, sehingga model yang layak digunakan *Fixed Effect Model*. Jadi model terbaik yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Models*.

Tabel 4 Hasil Regresi Fixed Effect Models

Dependent Variable: KMIS? Method: Pooled Least Squares Date: 01/09/18 Time: 10:54 Sample: 2006 2015 Included observations: 10 Cross-sections included: 5 Total pool (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.24569	42.67967	1.950476	0.0599
DAU?	2.25E-07	8.36E-08	2.693669	0.0112
PAD?	-1.32E-07	3.14E-08	-4.216301	0.0002
PDRB?	1.72E-06	1.02E-06	1.685994	0.1015
JP?	-0.000150	6.15E-05	-2.444716	0.0202
R-squared	0.926593	Mean dependent var		108.8202
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan Eview9

Hasil tabel didapatkan nilai koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0.926593 yang berarti menunjukkan bahwa sebanyak 92,65% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (7,35%) dijelaskan oleh variabel model yang lain. Sedangkan untuk F-statistik memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha = 5\% (0,05)$, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. DAU, PAD, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta.

Dari hasil uji signifikansi didapat probabilitas sebesar $0.0112 < \alpha = 5\% (0,05)$, artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar $2.25E-07$ serta mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika dana alokasi umum bertambah 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar $2.25E-07$ ribu jiwa.

Dari hasil uji signifikansi didapat probabilitas sebesar $0.0002 < \alpha = 5\% (0,05)$, artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar $1.32E-07$ serta mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika dana

alokasi umum bertambah 1 ribu rupiah maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar $1.32E-07$ ribu jiwa.

Dari hasil uji signifikansi didapat probabilitas sebesar $0.1015 < \alpha = 10\%$ (0,10), artinya adalah tidak signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. PDRB memiliki nilai koefisien sebesar $1.32E-07$ serta mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika PDRB bertambah 1 juta rupiah maka tidak akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar $1.32E-07$ ribu jiwa tidak memiliki pengaruh.

Dari hasil uji signifikansi didapat probabilitas sebesar $0.0202 < \alpha = 5\%$ (0,05), artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar 0.000150 serta mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika dana alokasi umum bertambah 1 ribu jiwa maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.000150 ribu jiwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kinerja fiskal terhadap kemiskinan di D.I Yogyakarta kurun waktu 2006-2015 adalah sebagai berikut :

1. Model estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model*. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.926593 yang berarti menunjukkan bahwa sebanyak 92,65% bisa dijelaskan dalam model (model yang digunakan baik).
2. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dana alokasi umum mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta, demikian sebaliknya.
3. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan asli daerah naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun.
4. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Produk domestik regional bruto secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Produk domestik regional bruto maka akan berpengaruh terhadap

peningkatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta demikian pula sebaliknya.

5. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk naik akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta demikian pula sebaliknya.
6. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada suatu yang mempengaruhi kinerja fiskal akan berdampak pada kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *J U R N a L E K B I S*, XIV(2), 677–689.
- Cholili, F. M. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1).
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26.
- Maipita, I., Janta, M. D., & Razak, N. A. A. (2010). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia, 12(4), 422–456. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v12i4.248>
- Mustika, C. (2011). Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990 - 2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), 12–23.
- Rahmawati, S. (2016). *Ekonomi Sumberdaya Manusia, kemiskinan dan Kesehatan Perspektif di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: deepublish.
- Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 130–143.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. (M. S. Khadafi, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sriyana, J. (2011). Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 15(2), 119–130.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel* (1st ed.). Yogyakarta: Ekonisia.

- Sriyana, J. (2015). kapasitas fiskal dan pengentasan kemiskinan sebuah analisa data panel untuk daerah istimewa yogyakarta indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1–10.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Broto (PDB) dan Indeks Pembangunanana Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.